

**SINERGI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
MELALUI KONSEP KARAKATAN
PADA MASYARAKAT TAPIN**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan Dalam
Penyelesaian Program Doktorat Ilmu Syariah**



Oleh:

MOHLIS

NIM. 200311020074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCA SARJANA DOKTORAL ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2025**

**SINERGI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN
MELALUI KONSEP KARAKATAN
PADA MASYARAKAT TAPIN**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan Dalam
Penyelesaian Program Doktorat Ilmu Syariah**



Oleh:

MOHLIS

NIM. 200311020074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCA SARJANA DOKTORAL ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : H. Mohlis, S.Ag., M.M.

NIM : 200311020074

Tempat/Tanggal Lahir : Murung Raya, 05 April 1968

Jurusan/Program Studi : Ilmu Syariah

Program Ilmu Syariah Pascasarjana menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul, "Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Konsep Karakatan Pada Masyarakat Tapin" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samarinda, Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



H. Mohlis
H. Mohlis, S.Ag., M.M.

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

	
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME	
1304/Un.14/IV/UPM-BP/05/2025	
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drilbit pada alamat https://www.drilbitplagiarismcheck.com/ , dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:	
Nama	: Mohlis
NIM	: 200311020074
Jenjang/Program Studi	: S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	: Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Konsep Karakatan Pada Masyarakat Tapin.
Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian TERBUKA .	
Banjarmasin, 09 Mei 2025	
Direktur,	
	 
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd	
NIP. 197105251997031006	

PERSETUJUAN DISERTASI

**SINERGI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KONSEP
KARAKATAN PADA MASYARAKAT TAPIN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

Mohlis

NIM 200311020074

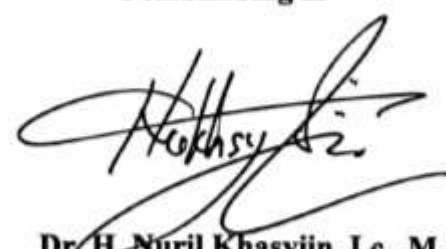
**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Untuk Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji**

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Jalaludin., M.Hum
Tanggal, Mei 2025

Pembimbing II



Dr. H. Nuril Khasyiin, Lc., M.A
Tanggal, 7 Mei 2025

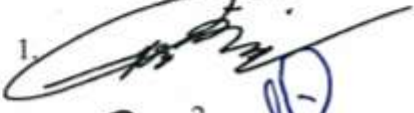
PENGESAHAN DISERTASI

SINERGI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KONSEP KARAKATAN PADA MASYARAKAT TAPIN

Disusun dan dipersembahkan oleh:

MOHLIS
NIM. 200311020074

Telah diajukan kepada Dewan Penguji
Pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025

- | Nama | Tanda Tangan |
|--|--|
| 1. Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D. | 1.  |
| 2. Prof. Dr. Ahmadi Hasan M.H | 2.  |
| 3. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. | 3.  |
| 4. Dr. Hj. Abnan Pancasilawati, S.Ag., M.Ag. | 4.  |
| 5. Mujiburohman, M.A., Ph.D. | 5.  |
| 6. Dr. H. Nuril Khasyi'in Lc., MA | 6.  |
| 7. Dr. H. Anwar Hafidzi MA.Hki | 7.  |

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin




Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., Ph.D.
NIP. 197105251997031006

KATA PENGANTAR

Seraya kita ucapkan puji dan syukur atas berkah, rahmat dan anugerah Allah SWT., penyusunan naskah disertasi yang berjudul “Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Konsep Karakatan Pada Masyarakat Tapin” yang diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan penyelesaian pascasarjana program doktor Ilmu Syariah ini dapat terselesaikan atas izin-Nya.

Shalawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Rasulullah SAW, penutup kenabian, pembawa risalah Islam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang setia menyampaikan kebenaran menuju jalan yang lurus bagaikan pelita yang menerangi di tengah kegelapan hidup umat manusia.

Karya tulis yang mengkaji Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Konsep Karakatan Pada Masyarakat Tapin tersebut sangat penting pada saat ini dan ke depannya dalam menjaga dan memelihara keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan suasana rukun dan damai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Kajian penelitian itu melihat pada aspek Sinergi Hukum Nasional dan Hukum Adat pada penyelesaian sengketa pertanahan yang merupakan Hukum Perdata, sehingga pada penelitian ini dilakukan melalui kajian hukum empiris.

Di kesempatan ini penulis haturkan terimakasih dan penulis ucapkan *jazaakumullahu khairan katsiiran, barakallahu fiikum wa iyyaakum* kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman., MA, Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

2. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie., M.Pd, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
3. Bapak Mujiburohman, M.A, Ph.D., selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Syariah. Terima kasih banyak atas semua bimbingan , petunjuk dan bantuan beliau kepada penulis selama penulis menyelesaikan proses akademik pada Program Studi S3 Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin;
4. Prof. Dr. H. Jalaluddin., M.Hum, selaku pembimbing I yang banyak memberikan motivasi, dukungan moral, bimbingan dan pemahaman kepada penulis;
5. Dr. H. Nuril Khasyiin, Lc., M.A, selaku pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyelesaian disertasi ini dari awal hingga akhir terutama terkait dengan pemahaman terhadap teknis penulisan disertasi;
6. Dosen-dosen Pasca Sarjana Program Doktorat Ilmu Syariah Islam UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan *khazanah* keilmuannya kepada penulis;
7. Civitas akademika Pasca Sarjana Program Doktorat Ilmu Syariah Islam UIN Antasari Banjarmasin, yang selama ini membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan;
8. Informan baik dari kalangan penulis maupun tokoh yang memberikan berbagai informasi penting yang bersentuhan langsung dengan disertasi yang penulis teliti;
9. Keluargaku yang menjadi sumber inspirasi dan daya dorong serta spirit penulis dalam menjalani proses yang telah dilalui, dan;
10. Rekan-rekan seperjuangan, baik rekan di lingkungan kerja, rekan di lingkungan aktivis, rekan seperkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan tersusunnya disertasi ini, semoga dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulis untuk selalu berkarya dan memberikan manfaat bagi sesama, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Semoga juga dapat membawa keberkahan bagi kita semua. *Aamiin yaa rabb*.

Samarinda, Januari 2025

Penulis,

H. Mohlis, S.Ag., M.M

ABSTRAK

Mohlis. NIM. 200311020074. “*Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Konsep Karakatan pada Masyarakat Tapin*”, Disertasi, Pembimbing I: Prof. Dr.H. Jalaluddin., M.Hum; Pembimbing II, Dr. H.Nuril Khasyiin, Lc., M.A, Pasca Sarjana Program Doktoral Ilmu Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Penyelesaian Non Ligitasi, Mediasi Tahuta Kampung, Budaya Hukum Pertanahan Banjar

Sengketa pertanahan di masyarakat Tapin berpotensi menjadi konflik sosial jika tidak diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan. Secara antropologis dan sosiologis, masyarakat Banjar memiliki budaya “karakatan,” tradisi turun-temurun dalam menyelesaikan masalah melalui musyawarah kekeluargaan. Penelitian ini mengkaji sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah di Tapin melalui konsep karakatan.

Tujuan penelitian adalah menganalisis dan menjelaskan sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa, serta menjelaskan konsep karakatan sebagai model penyelesaian berbasis lokal. Penelitian ini menggunakan teori keadilan sebagai dasar utama (*grand theory*), dikombinasikan dengan teori negara hukum, teori kepastian dan kemanfaatan hukum, serta teori keadilan restoratif sebagai kerangka analisis. Teori mediasi digunakan sebagai pendekatan terapan untuk mengkaji model ideal penyelesaian sengketa.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik masyarakat, menitikberatkan pada perilaku individu, kelompok, maupun lembaga hukum. Penelitian dilakukan secara sistematis, metodologis, dan analitis untuk menghasilkan deskripsi kualitatif yang dapat disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bacu’ur* membuka ruang dialog inklusif, *basuluh* menghasilkan kompromi melalui peran mediator, dan *bapatut* memulihkan harmoni sosial setelah sengketa. Namun, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip hukum adat dengan hukum nasional yang lebih kaku serta dalam memperoleh legitimasi formal untuk hasil *karakatan*. Penelitian ini merekomendasikan agar konsep *karakatan* diinstitusionalisasikan sebagai kerangka hukum pelengkap guna mendukung pluralisme hukum dan memperkuat kohesi sosial nasional. Konsep *karakatan* dinilai sejalan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 21 UUSA 1838, UUD 1945, serta UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. *Karakatan* juga sesuai dengan peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Agraria No. 1 Tahun 1999 dan No. 21 Tahun 2020, yang mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta didukung oleh UU No. 16 Tahun 2023 tentang tugas dan kewajiban kepala desa yang mengutamakan mekanisme musyawarah. *Karakatan* menonjolkan prinsip keadilan, kebermanfaatan hukum, dan keadilan restoratif melalui pendekatan kekeluargaan yang menghasilkan kesepakatan *babarakatan* atau persaudaraan.

ABSTRACT

Mohlis. Student ID: 200311020074. *“The Synergy of Customary Law and National Law in Land Dispute Resolution through the Karakatan Concept in the Tapin Community”*, Dissertation, Supervisor I: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum; Supervisor II: Dr. H. Nuril Khasyiin, Lc., M.A., Doctoral Program in Sharia Sciences, Postgraduate School, State Islamic University of Antasari Banjarmasin, 2025.

Keywords: *Non-Litigation Settlement, Mediation in the Village, Land Law Culture in Banjar*

Land disputes in the Tapin community have the potential to escalate into social conflict if not resolved through either judicial or non-judicial means. Anthropologically and sociologically, the Banjar people uphold a traditional practice known as karakatan, a hereditary custom of resolving disputes through familial deliberation. This study examines the synergy between customary law and national law in resolving land disputes in Tapin through the karakatan concept.

The objective of this research is to analyze and explain the synergy between customary law and national law in dispute resolution, as well as to describe karakatan as a locally based resolution model. This study applies the theory of justice as the grand theory, combined with the theory of the rule of law, the theory of legal certainty and utility, and the theory of restorative justice as analytical frameworks. Mediation theory is employed as an applied approach to explore the ideal model for dispute resolution.

The method used is empirical legal research (socio-legal research), which examines the application of law in societal practice, emphasizing the behavior of individuals, groups, and legal institutions. The research is conducted systematically, methodologically, and analytically to produce a qualitative description from which conclusions can be drawn.

The findings reveal that bacu’ur opens space for inclusive dialogue, basuluh facilitates compromise through the role of a mediator, and bapatut restores social harmony after a dispute. However, challenges remain in integrating the principles of customary law with the more rigid national legal system, as well as in obtaining formal legitimacy for the outcomes of karakatan. This study recommends the institutionalization of karakatan as a complementary legal framework to support legal pluralism and strengthen national social cohesion. The karakatan concept aligns with the provisions of Articles 3 and 21 of the 1838 UUSA, the 1945 Constitution, and the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960. It also corresponds with technical regulations such as Minister of Agrarian Affairs Regulation No. 1 of 1999 and No. 21 of 2020, which encourage dispute resolution through mediation, and is further supported by Law No. 16 of 2023 concerning the duties and responsibilities of village heads, which emphasize deliberation-based mechanisms. Karakatan highlights the principles of justice, legal utility, and restorative justice through a familial approach, resulting in babarakatan or fraternal agreements.

مستخلص البحث

مخلص، الرقم الجامعي: 200311020074. “التكامل بين القانون العربي والقانون الوطني في تسوية نزاعات الأراضي من خلال مفهوم الكراكتان في مجتمع تابين”، أطروحة دكتوراه، المشرف الأول: الأستاذ الدكتور جلال الدين، م. حوم؛ المشرف الثاني: الدكتور نوريل خشين، ليسانس، ماجستير، برنامج الدكتوراه في علوم الشريعة، الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية ألتاساري، بانجارماسين، 2025.

الكلمات المفتاحية: مفهوم الكراكتان، الوساطة، نزاع الأراضي

إنّ نزاعات الأراضي في مجتمع تابين تُعدّ من القضايا التي قد تتطور لتصبح صراعًا اجتماعيًا إذا لم تُحلّ سواءً عبر المسار القضائي أو غير القضائي. ومن الناحية الأنثروبولوجية والاجتماعية، يميّز مجتمع بانجار بثقافة “الكراكتان”، وهي تقليد متوارث لحلّ النزاعات من خلال التشاور الأسري. تهدف هذه الدراسة إلى بحث أوجه التآزر بين القانون العربي والقانون الوطني في تسوية نزاعات الأراضي في تابين من خلال مفهوم الكراكتان.

وتهدف الدراسة إلى تحليل وشرح التآزر بين القانون العربي والقانون الوطني في تسوية النزاعات، بالإضافة إلى توضيح مفهوم الكراكتان كنموذج محليّ لحلّ النزاعات. وتستند هذه الدراسة إلى نظرية العدالة كنظرية كبرى، إلى جانب نظرية دولة القانون، ونظرية اليقين والمنفعة القانونية، فضلاً عن نظرية العدالة التصالحية كإطار تحليلي. كما تُستخدم نظرية الوساطة كمدخل تطبيقي لدراسة النموذج المثالي لتسوية النزاعات.

وقد استخدمت الدراسة المنهج القانوني التجريبي (البحث الاجتماعي-القانوني) الذي يبحث في تطبيق القانون في واقع المجتمع، ويركّز على سلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات القانونية. وأُجري البحث بشكل منهجي ومنهجي وتحليلي بهدف الوصول إلى وصف نوعي يمكن استخلاصه.

وتُظهر نتائج الدراسة أنّ مرحلة “باجوور” تفتح مجالاً للحوار الشامل، و”باسولوه” تؤدي إلى حلول توافقية من خلال دور الوسيط، و”باباتوت” تُعيد الانسجام الاجتماعي بعد النزاع. ومع ذلك، هناك تحديات تتعلق بدمج مبادئ القانون العربي مع صرامة القانون الوطني، وكذلك في الحصول على شرعية رسمية لنتائج الكراكتان. وتوصي الدراسة بضرورة تأطير مفهوم الكراكتان كمكوّن قانوني مكمل يدعم التعددية القانونية ويُعزّز التماسك الاجتماعي الوطني. كما يُعدّ مفهوم الكراكتان متوافقاً مع أحكام المادة 3 والمادة 21 من قانون الأراضي لعام 1838، والدستور الإندونيسي لعام 1945، وكذلك القانون الأساسي للزراعة رقم 5 لسنة 1960. ويتمشى الكراكتان أيضاً مع اللوائح الفنية مثل لائحة وزير الشؤون الزراعية رقم 1 لسنة 1999 ورقم 21 لسنة 2020، التي تشجّع على حلّ النزاعات عبر الوساطة، فضلاً عن الدعم المقدم من القانون رقم 16 لسنة 2023 بشأن مهام ومسؤوليات رؤساء القرى الذين يُعطون الأولوية لآلية التشاور. ويُبرز الكراكتان مبادئ العدالة، ومنفعة القانون، والعدالة التصالحية من خلال مقارنة أسرية تؤدي إلى اتفاق “باباراكتان” أو الأخوة.

DAFTAR ISI

	Halaman
DISERTASI	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ii
SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN DISERTASI	iv
PENGESAHAN DISERTASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian dan Signifikasi Penelitian	26
D. Definisi Operasional	27
E. Penelitian Terdahulu	33
F. Kajian Teori.....	45
G. Kerangka Pikir.....	57
H. Sistematika Penulisan	57
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG PENGATURAN PERTANAHAN DALAM HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT	
A. Definisi Hukum dan Hukum Adat	60
B. Indonesia Sebagai Negara Hukum	66
C. Negara Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum	75
D. Hukum Agraria di Indonesia	100
E. Pemberlakuan Hukum Nasional, Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia.....	144
F. Bentuk Penyelesaian Konflik Pertanahan di Indonesia	153
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	176
B. Pendekatan Penelitian	177
C. Lokasi Penelitian	184
D. Subyek dan Objek Penelitian	184
E. Data dan Sumber Data	185
F. Teknik Pengumpulan Data	187
G. Teknik Analisis Data	190
H. Kerangka Pemikiran	201

BAB IV FUNGSI KULTURAL KONSEP KARAKATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KABUPATEN TAPIN	
A. Makna filosofis dan kultural dalam konsep Karakatan	204
B. Pandangan Masyarakat Tapin tentang Hukum Pertanahan Nasional.....	235
C. Benang Merah Konsep Karakatan dengan Hukum Adat dan Hukum nasional Pada Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Tapin....	
D. Relasi Antara Konsep Karakatan Dengan Hukum Adat dan Hukum Nasional Pada Masyarakat Tapin	252
F. Karakatan Mewujudkan sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional di Tapin.....	301
	326
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	
B. Implementasi	355
C. Rekomendasi	357
	358

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Karakatan Masyarakat Tapin	18
Tabel 2 Contoh Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Bacu'ur Pada Masyarakat Tapin	260
Tabel 3 Contoh penyelesaian sengketa tanah melalui ba suluh pada masyarakat Tapin	264
Tabel 4 Contoh Penyelesaian sengketa pertanahan masyarakat Tapin melalui Bapatut	266
Tabel 5 Perbandingan Konsep Karakatan dan Hukum Adat Badamai...	298
Tabel 6 Keunggulan Sinergi Karakatan & Hukum Nasional	327
Tabel 7 Karakatan Dalam Sinergi Hukum Adat Dan Hukum Nasional Terkait Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Masyarakat Tapin	339
Tabel 8 Contoh kasus sengketa tanah Masyarakat Tapun yang memiliki sertifikat dengan perusahaan.....	343

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Skema Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional Melalui Konsep karakatan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tapin	174
Gambar 2 Akar Penelitian Hukum Empiris.....	181
Gambar 3 Alur pikir Penelitian Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional serta Konsep Karakatan dalam penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat Tapin	202
Gambar 4 Mediasi Penyelesaian Sengketa pertanahan pada Masyarakat Tapin	257